Renstra
2016 - 2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan kualitas hidup manusia. Artinya faktor pembangunan kualitas hidup manusia menjadi pokok perhatian di semua bidang pembangunan.

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin.

Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Laki-laki dan perempuan, serta anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak untuk bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan yang setara disesuaikan dengan pengalaman, kebutuhan dan permasalahan masing-masing sehingga mereka mendapatkan keadilan dan kesetaraan.

Perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak adalah lebih dari sekedar meningkatkan derajat perempuan dan anak, tetapi juga merupakan hal yang penting untuk bisa mencapai tujuan pembangunan, karena perempuan dan anak merupakan asset dan potensi pembangunan.

Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan baik sebagai pelaku pembangunan maupun penerima manfaat hasil pembangunan.

Jumlah Penduduk Kota Gunungsitoli Tahun 2015 menurut angka proyeksi BPS Kota Gunungsitoli adalah sebanyak 135.995 Jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 66.515 Jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 69.480 jiwa, dengan sex ratio kota Gunungsitoli adalah 96 persen, artinya jika ada 96 laki-laki di Kota Gunungsitoli maka ada 100 perempuan di Kota Gunungsitoli pada tahun 2015.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Kota Gunungsitoli menunjukkan perkembangan dari 71,76 pada tahun 2011 menjadi 73,65 pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia Indonesia di Kota Gunungsitoli dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terus menunjukkan peningkatan.

Untuk mengetahui apakah pembangunan manusia telah setara antara laki-laki dan perempuan, maka digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggunakan dimensi yang sama dengan IPM, tetapi telah memperhitungkan pencapaian pembanguan antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil kesejangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang diukur melalui IPM masih belum cukup efektif memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan baik dilevel nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Oleh sebab itu, pemerintah baik di pusat dan daerah harus mampu menyusun program pembangunan yang lebih responsif gender. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus akademik.

Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Kota Gunungsitoli.

Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif. Perencanaan partisipatif terutama diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih sistematik dalam mengantisipasi permasalahan kesenjangan gender, yaitu adanya perbedaan akses pada suatu peluang untuk memperoleh sumber daya pembangunan antara laki-laki dan perempuan diberbagai bidang pembangunan sehingga berdampak pada adanya perbedaan partisipasi kontrol masing-masing pihak

yang mengakibatkan perbedaan antara keduanya dalam memperoleh manfaat pembangunan.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana pembangunan dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan, Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli yakni membantu Walikota dalam Menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka pada proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau *stakeholders*, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat (keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan yang mengisyaratkan kepada kaum perempuan untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan. Peningkatan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung diakukan melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akselerasi proses pembangunan.

Dalam RPJMD Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 pada Misi 1 (satu) Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan strategi 3 (tiga) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Strategi 4 (empat) Penguatan kelembagaan perlindungan anak yang dirumuskan dalam kebijakan umum dan diformulasikan dalam 4 prespektif yaitu: 1)Kebijakan pada prespektif masyarakat/layanan yaitu

peningkatan cakupan layanan pengarusutamaan gender ;peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak . 2)Kebijkan prespektif Proses Internal yaitu *peningkatan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan; peningkatan pelayanan yang mendukung pertumbuhan anak*; 3)Kebijakan prespektif Kelembagaan yaitu *Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan Kelembagaan perlindungan perempuan serta peningkatan efektifitas kelembagaan perlindungan Anak* 4)Kebijakan prespektif Keuangan yaitu *Peningkatan dukungan pendanaan terhadap program dan kegiatan PUG dan Kegiatan Perlindungan anak.*

Oleh karena itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diharapkan dan harus mampu meningkatkan kapasitasnya dalam perencanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli.

Dalam kaitan tersebut di atas, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoi perlu memperhatikan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip *good governance* yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Prinsip *good governance* ini telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli (RPJPD) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Dengan demikian, kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan

kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai *good governance* secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kota Gunungsitoli, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD ini meliputi landasan hukum yang bersifat umum dan teknis. Landasan hukum yang secara umum menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD meliputi :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

   Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian / Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004, *RPJM daerah* juga merupakan *Renstra Daerah*. Dalam pasal 7 Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Renstra SKPD.

2. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2016-2021.

   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah
4. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 08Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan Peraturan Walikota Nomor: 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli

Adapun landasan hukum yang lebih bersifat teknis, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminaif Terhadap Wanita (CEDAW);
3. Undang-Undang Nomor 68 tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesetaraan Lansia;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM)

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
11. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perkembangan Kependudukan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
15. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan

Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani selama lima tahun ke depan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamanatkan oleh RPJMD 2016-2021.

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli tahun 2016-2021 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Gunungsitoli yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan pembangunan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Kota Gunungsitoli dalam upaya mendukung Visi Wali Kota dan Wakil Walikota Gunungsitoli 2016-2021 yaitu **"Kota Gunungsitoli, Yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing"** Adapun tujuan khusus penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli;

2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

I.4. Sistematika Penulisan :

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD.

Berisi uraian tentang Tugas dan Fungsi SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan Stuktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD dan Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Berisi uraian ringkas tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaaahan Renstra K/L dan

Renstra; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi uraian ringkas tentang Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memuat pola mengenai tujuan serta sasaran dan kegiatan dari setiap kebijakan, selain itu mengungkap mengenai nilai-nilai dasar dan strategi dalam rangka pembangunan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

BAB V Rencana Program, Kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Berisi uraian ringkas tentang program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama kurun waktu 2016-2021.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berisi uraian ringkas tentang indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

LAMPIRAN

Tabel 5.1

Tabel 6.1

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI

2.1. TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Dalam rangka penugasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan Peraturan Walikota Nomor: 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota gunungsitoli:

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Kota Gunungsitoli mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian kuantitas Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah;
3. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengendalian kuantitas Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian kuantitas Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
5. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
6. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;

7. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

8. Pelaksanaan pemberdayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB dan kader KB.
9. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
10. Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana
11. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
12. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
13. Pelaksanaan Kelompok jabatan fungsional
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

A. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas di atas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin Pembinaan Pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli;
b. Memimpin arahan, bimbingan kepada Pejabat Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli;
c. Memimpin Instruksi pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli;

d. Membantu Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan tugas bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Membantu Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan daerah dalam pelaksanaan kewenangan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Mengkoordinasikan hubungan kerja antara bidang/sekretariat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli;
g. Memimpin dan memberi petunjuk tentang tugas-tugas bidang kesekretariatan, Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Memimpin rapat koordinasi maupun intern di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli serta menghadiri rapat-rapat dan melakukan konsultasi dan koordinasi antar instansi terkait;
i. Menetapkan tugas kepada sekretaris/para kepala bidang/kepala sub bagian/Kepala Seksi serta menandatangani dan membubuhkan paraf pada surat-surat sesuai menurut fungsi yang ditentukan;
j. Memvalidasi tugas-tugas yang sudah dilaksanakan setiap bidang dan sekretariat;
k. Mempromosikan tingkat kemampuan dan kecakapan pegawai dalam penguasaan tugas;
l. Mempromosikan usul kenaikan pangkat pegawai baik regular maupun pilihan;
m. Mengkoordinasikan usul program kegiatan dan Anggaran APBD serta menetapkan tahapan penggunaan anggaran masing-masing bidang;

n. Memimpin tugas lain yang diberikan Walikota Gunungsitoli melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dii atas, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dibantu oleh :

1. Sekretaris;
2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli

1. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bagian Tata Usaha, Perencanaan dan Keuangan.
2. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai fungsi :
   a. Memverifikasi Pembinaan Pegawai pada Lingkup Sekretariat;
   b. Memverifikasi Arahan, Bimbingan kepada Pejabat Struktural pada Lingkup Sekretariat, Keuangan, Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Umum;
   c. Memverifikasi Instruksi Pelaksanaan Tugas Lingkup Sekretariat;
   d. Memverifikasi Penyusunan Program kegiatan lingkup sekretariat;
   e. Memverifikasi pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;

f. Memverifikasi urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

g. Memverifikasi ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.

3. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai tugas :

a. Memverifikasi tugas-tugas di sub bagian Tata Usaha serta pelayanan umum;

b. Mengkoordinasi hubungan kerja antar sub bagian Tata Usaha, perencanaan dan keuangan;

c. Mengkoordinasikan dan Memverifikasi tugas-tugas yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan surat/naskah dinas;

d. Memverifikasi naskah dinas yang telah disiapkan setiap bidang sebelum ditandatangani Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli;

e. Mengkoordinasikan petunjuk Kepala Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli kepada masing-masing sub bagian menurut fungsi yang ditentukan;

f. Mengevaluasi tugas yang telah dilaksanakan oleh setiap sub bagian;

g. Mengevaluasi penilaian mengenai kemampuan dan kecakapan pegawai lingkup Sekretariat setiap akhir tahun;

h. Mengkoordinasikan kelancaran tugas seluruh bidang di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli;

i. Mengkoordinasi usul pengajuan program kerja dan biaya dari masing-masing bidang;

j. Mempromosikan hasil kerja dengan cara mengajukan telaahan staf baik tertulis maupun lisan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli;
k. Mengkoordinasikan telaahan staf kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli;
l. Mengkoordinasikan saran dan pendapat kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Gunungsitoli;
m. Memimpin konsultasi termasuk rapat/pertemuan antar instansi sesuai dengan petunjuk pimpinan;
n. Mengkoordinasi tugas-tugas penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli;
o. Memimpin tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dibantu oleh :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

C. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dalam menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk sistem informasi keluarga, advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, advokasi penggerakan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
d. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kota Gunungsitoli;
f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kota gunungsitoli di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
i. Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dibantu oleh :

1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
2. Seksi Advokasi, penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.

D. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dalam menyelenggarakan urusan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
   a. Perumusan Kebijakan teknis daerah di Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
   b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
   c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
   d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kota Gunungsitoli;
   e. Pelaksanaan Fasilitasi pelayanan KB di Kota Gunungsitoli;
   f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kota Gunungsitoli;
   g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
i. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga, UPPKS;
j. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan rentan serta pusat informasi konseling remaja/mahasiswa (PIK-R/M);
k. Pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
l. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pelaksanaan tugasnya.
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dibantu oleh :

1. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana
2. Seksi Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga

E. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
   a. Perumusan Kebijakan teknis daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
   b. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang Perlindungan Anak;
   c. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   e. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan program pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   f. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
   g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
   i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dibantu oleh:

1. Seksi Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Seksi Pencegahan dan penanganan Kekerasan

F. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja subbagian Tata Usaha
2. Menyusun urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas;
3. Menyusun pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
4. Menyusun urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
5. Menyusun pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
6. Merencanakan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
7. Menentukan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang invantaris;
8. Merencanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
9. Merencanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas;
10. Membuat konsep dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta memberi penghargaan;
11. Menganalisis bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
12. Menentukan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
13. Merencanakan pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
14. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
15. Menyusun bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
16. Menganalisis pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha
17. Mengembangkan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja subbagian perencanaan dan keuangan;
2. Merancang kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
3. Menganalisis penyusunan laporan realisasi keuangan;
4. Menganalisis penyusunan laporan keuangan semesteran;
5. Menganalisis penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
6. Menganalisis pengelolaan keuangan;
7. Menyusun rencana strategis dinas;
8. Menyusun program dan kegiatan dinas;
9. Menganalisis data dalam Menyusun program dan kegiatan tahunan dinas;
10. Menentukan hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
11. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
12. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
13. Mengkaji ulang kegiatan perencanaan;
14. Mengembangkan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Sejahtera.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
2. Menyusun kebijakan teknis pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
4. Menyusun rencana kegiatan dan penetapan kinerja pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
5. Menyusun rencana teknis penyelenggaraan kerja dan administrasi penduduk;
6. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma standar peyunjuk operasional dibidang pengendalian penduduk dan informasi kependudukan;
7. Melaksanakan pengendalian, pengarahan, mobilitas dan persebaran penduduk;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengendalian penduduk dan informasi kependudukan ;
9. Menyiapkan bahan informasi kependudukan ;
10. Menyajikan data statistik kendudukan;
11. Menyelenggarakan informasi kependudukan;
12. Melaksanakan analisis dan pengkajian data dibidang kependudukan;
13. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi dibidang kependudukan.
14. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan atasan sesusai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

I. Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB

Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB mempunyai tugas :

1. Penyiapan dan perumusan petunjuk teknis advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang advokasi Penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan penggerakan data komunikasi, informasi dan edukasi;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan Norma,Standar, Prosedur dan Kinerja (NSPK) di bidang pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
4. Pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan serta komunikasi informasi dan edukasi;
5. Penyiapan bahan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendayagunaan Tugas Lapangan PLKB dan Kader Keluarga berencana;
6. Penyiapan Bahan Penguasaan Potensi wilayah kerja di bidang Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB;
7. Penyiapan Bahan Pembentukan Kader Pelatihan, Orientasi, Bimbingan Teknis, Workshop dan Kegiatan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di Bidang Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB;
8. Penyiapan Institusi masyarakat Pedesaan (IMP) dan dalam melaksanakan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam melaksanakan Informasi dan Edukasi (KIE) dan Konseling;
9. Penyiapan penyusunan Program dan kegiatan di bidang Advokasi dan Penggerakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
10. Penyiapan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan iklan layanan KB , Baliho dan papan motivasi KB;
11. Penyiapan Pelaksanaan Komunikssi, Informasi dan edukasi (KIE) melalui sarana mobil unit penerangan (Mupen);

12. Penyiapan koordinasi pelaksanaan perayaan yang berhubungan dengan keluarga dan lomba-lomba dalam rangka Peringatan hari Keluarga Nasional;
13. Penyiapan penggerakan tokoh agama dan masyarakat dalam pelaksanaan program kependudukan dan Keluarga Berencana;
14. Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah- langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

J. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana

Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

1. Penyusunan petunjuk teknis Daerah di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Menyiapkan bahan kordinasi dan kerjasama baik dilingkungan Instansi dibidang operasional KB dan KR serta Institusi
3. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi Pria, Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Pencegahan HIV/AIDS, IMS (Infeksi Menular Seksual) dan Bahaya NAPZA (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif).
4. Pengumpulan, Pengolahan dan analisis data jaminan pelayanan keluarga berencana;
5. Pengayoman dan pelaksanaan terhadap kesertaan keluarga berencana
6. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan, kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

7. Pengendalian pelayanan keluarga berencana baru dan peserta keluarga berencana binaan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok;

K. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Seksi Ketahanan Kesejahteraan keluarga di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :

1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan ekonomi keluarga;
3. Pengelolaan, pembinaan dan Fasilitasi kelompok – kelompok UPPKS;
4. Pembinaan pengembangan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), BKB HI (Bina Keluarga Balita Holistik Integratif), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK R/M (Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa);
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok;

L. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Seksi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :

1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan

2. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengarusutamaan gender;
3. Pengelolaan pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan;
4. Pembinaan pengelolaan pengarusutamaan gender ;
5. Fasilitasi terhadap upaya pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan pengarusutamaan gender;
6. Pengembangan jaringan informasi gender;
7. Menyusun data dan laporan tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan;
8. Menyusun data anggaran responsif gender;
9. Melaksanakan hasil-hasil koordinasi dengan instansi terkait di bidang pemberdayaan perempuan;
10. Mengkaji ulang dan memfasilitasi masalah-masalah yang timbul di bidang pemberdayaan perempuan;
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
12. Menata dan memelihara dokumen hasil kegiatan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan perempuan.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok;

M. Seksi Pencegahan dan Kekerasan

Seksi Pencegahan dan Kekerasan di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Pencegahan dan Kekerasan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan petunjuk teknis tentang pencegahan kekerasan dan pembinaan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan pembinaan perlindungan anak;
3. Pelayan dan pengendalian administrasi rekomendasi pengangkatan dan pengasuhan anak.

4. Fasilitasi terhadap upaya pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan Perlindungan anak;
5. Pengembangan jaringan informasi perlindungan anak;
6. Menyusun data dan laporan tentang pelaksanaan kegiatan Perlindungan anak;
7. Melaksanakan hasil-hasil koordinasi dengan instansi terkait di bidang Perlindungan anak;
8. Mengkaji ulang dan memfasilitasi masalah-masalah yang timbul di bidang Perlindungan anak;
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
10. Menata dan memelihara dokumen hasil kegiatan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan bidang Perlindungan anak.

2.2. STRUKTUR OGANISASI SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor: 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli. Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Kota Gunungsitoli terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu, untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dibantu oleh :
   a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   b. Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Sejahtera membawahi 2 (dua) seksi yaitu seksi Pengendalian penduduk dan informasi keluarga, Seksi Advokasi, Pergerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB.
   c. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 2 (dua) seksi yaitu Seksi Jaminan dan

Pembinaan kesertaan ber-Keluarga berencana dan Seksi Ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI

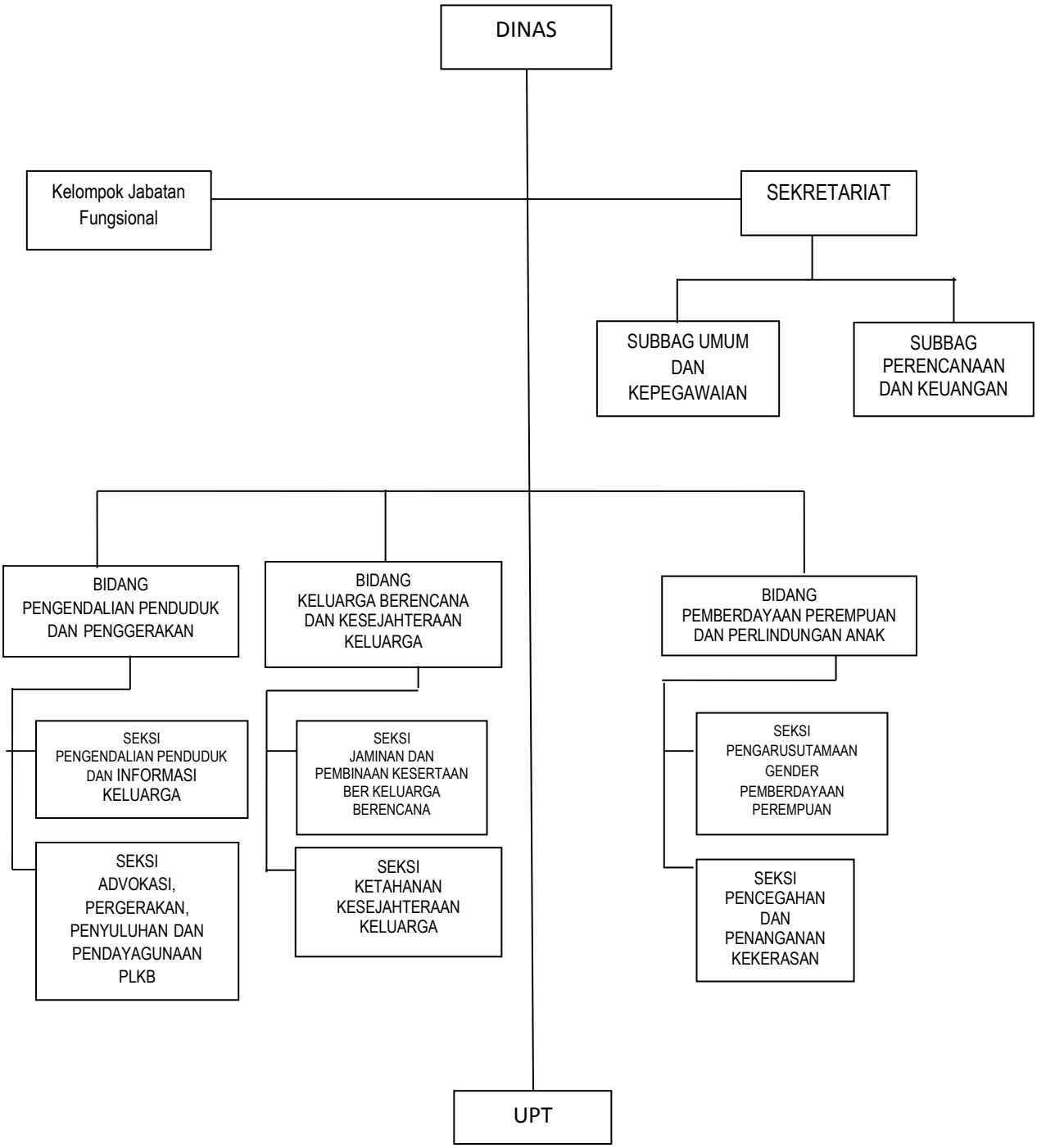

2.2.1.Komposisi Pegawai

Komposisi Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli, berdasarkan jabatan/esolon, pangkat, golongan dan kualifikasi pendidikan disajikan pada tabel 1 dan rekapitulasi dari komposisi pegawai tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Jabatan/Esolon	Jumlah Orang	Pangkat/ Golongan (org)	Pendidikan (org)	Ket
	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli					
a.	Kepala Dinas	Struktural / II b	1			
b.	Sekretaris	Struktural / III a	1			
c.	Kepala Bidang	Struktural / III b	3			
d.	Kepala Sub Bagian	Struktural / IV a	2			
d.	Kepala Sub Bidang	Struktural / IV a	6			
e.	Staf	Fungsional Umum	5			
f	PLKB PNS		5			
g	PLKB Non PNS		20			
	Jumlah					

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli, disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Inventaris	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Mini Bus (Penumpang 15 Orang ke bawah)	-	-	-
2.	Mobil Unit Penerangan (MUPEN)	1	Unit	Baik
3.	Sepeda Motor	13	Unit	Baik
4.	Filling Besi/Metal	1	Unit	Baik
5.	Papan Instansi	-	-	-
6.	Papan Pengumuman	-	-	-
7.	Papan White Board	-	-	-
8.	Lemari Kayu (Gantung)	-	-	-
9.	Lemari Kayu	-	-	-
10.	Rak Kayu	-	-	-
11.	Kursi Besi/Metal	1	Unit	Baik
12.	Kursi Tamu	-	-	-
13.	Kursi Putar	1	Unit	Baik
14.	Kursi Biasa	-	-	-
15.	Kursi Lipat	6	Unit	Baik
16.	Meja Komputer	-	-	-

17.	Meja ½ biro	3	Unit	Baik
18.	Sofa	-	-	-
19.	Jam Mekanis	-	-	-
20.	AC Split	1	Unit	Baik
21.	Kipas Angin	-	-	-
22.	Unit Power Supply	-	-	-
23.	Tustel Kamera Digital	2	Unit	Baik
24.	Tiang Bendera	-	-	-
25.	Lain-Lain (Taplak Meja)	-	-	-
26.	Lain-Lain (Gorden)	-	-	-
27.	P.C.Unit	1	Unit	Baik
28.	Laptop	-	-	-
29.	Note Book	1	Unit	Baik
30.	Printer	5	Unit	Baik
31.	Meja Kerja Pejabat Esolon III/Meja Biro	1	Unit	Baik
32.	Kursi Kerja Pejabat Esolon II	1	Unit	Baik
33.	Kursi Kerja Sandaran punggung	1	Unit	Baik
34.	Lemari Arsip	4	Unit	Baik
35.	Brankas	-	-	-
36.	Facsmile	-	-	-
37.	Proyektor	-	-	-
38.	Wireless Amplifier (Publik Address)	1	Unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli.

Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli, disajikan pada tabel dibawah ini :

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Gunungsitoli
Tahun 2010,2014 dan 2015

Tabel a

NO.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun (%)	
		2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
1.	Gunungsitoli Idanoi	21.482	22.843	23.147	7,75	1,33
2.	Gunungsitoli Selatan	13.739	14.611	14.808	7,78	1,35
3.	Gunungsitoli Barat	7.436	7.906	8.011	7,73	1,33
4.	Gunungsitoli	60.625	64.467	65.333	7,77	1,34
5.	Gunungsitoli Utara	6.708	7.131	7.226	7,72	1,33
6.	Gunungsitoli Alo'oa	16.212	17.238	17.470	7,76	1,35
Kota Gunungsitoli		**126.202**	**134.196**	**135.995**	**7,76**	**1.34**

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Gunungsitoli

Tahun 2015

Tabel b

DAERAH	Jumlah Penduduk		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
Kota Gunungsitoli	**66.155**	**69.480**	**139.995**	**95,73**

Rasio Akseptor KB
Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2015

Tabel c

NO.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Akseptor KB	7.337	9.830	10.114	15.296	11.929
2.	Pasangan Usia Subur	1.426	3.381	18.015	22.477	19.817
3.	Rasio Akseptor KB	5.02	2.91	0.56	0.68	0.60

Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan
Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2015

Tabel d

NO.	Kecamatan	Jumlah Akseptor KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
1.	Gunungsitoli Idanoi	2.556	22.843	0,60
2.	Gunungsitoli Selatan	1.389	14.611	0,54
3.	Gunungsitoli Barat	986	7.906	0,71
4.	Gunungsitoli	3.223	64.467	0,41
5.	Gunungsitoli Utara	1.961	7.131	0,81
6.	Gunungsitoli Alo'oa			
Jumlah		**11.929**	**19.817**	**0,60**

Perkembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2015

Tabel e

NO.	Jenis Sarana	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengadaan MOPEN	Unit	-	1			
2.	Pengadaan Kendaraan roda 2	Unit	-	12			
3.	Pengadaan Obgyn Bed	Unit	-	2			4
4.	Pengadaan PC Computer	Unit	-	10			-
5.	Pengadaan Public Address	Unit	-	2			6
6.	Pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	Unit	-				1
7	Pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa	Unit	-				1
8	Pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Gunungsitoli Barat	Unit	-				1
10	Pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Gunungsitoli Utara	Unit	-	-	-	-	1
Jumlah				**27**			**14**

Perkembangan Jumlah PPKBD
Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2015

Tabel f

Tahun	Satuan	Jumlah
2011	101	101
2012	101	101
2013	101	101
2014	101	101
2015	101	101

Pada tabel a diatas dapat dilihat bahwa Laju pertumbuhan penduduk Kota Gunungsitoli kurun waktu 2010-2015 sebesar 7,76 persen dengan laju pertumbuhan tertinggi berada di Kecamatan Gunungsitoli.

Pada tabel b diatas dapat dilihat bahwa persentase penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih besar dari pada laki-laki dengan rasio jenis kelamin 95,73.

Pada tabel c dan d diatas dapat dilihat bahwa Rasio Akseptor KB di Wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, yakni dari 5,02 persen pada tahun 2011 menjadi 0,06 persen tahun 2015. Sementara jumlah akseptor KB cenderung mengalami peningkatan yakni dari 7.337 akseptor menjadi 11.929 akseptor tahun 2015. Penurunan rasio akseptor KB kurun waktu 2011-2015, secara umum disebabkan pertumbuhan pasangan usia subur tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah akseptor KB.

Pada tabel e dan f diatas dapat dilihat bahwa perkembangan sarana dan prasarana pelayanan KB dan Jumlah PPKBD masih perlu terus ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Perkembangan dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pengendalian, Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli sebelum terbitnya perangkat Daerah Baru berdasarkan PP No.18 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.1. dan tabel 2.2. berikut dibawah ini :

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum Optimalnya upaya pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga lainnya dalam membangun pemahaman bersama tentang program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Terbatasnya Fasilitator/Tenaga Pendamping yang memahami program pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
3. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek dan dimensi pembangunan
4. Belum adanya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak
5. Belum optimalnya upaya perlindungan anak terhadap pengaruh negative globalisasi dan media
6. Belum optimalnya pemahaman dan implementasi kesetaraan gender dalam berbagai aspek
7. Masih rentannya masalah trafiking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
8. Terbatasnya ketersediaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sesuai dengan standar pelayanan minimal
9. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja PLKB
10. Belum Optimalnya upaya pengendalian penduduk
11. Rendahnya kesadaran masyarakat sebagai peserta KB

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarnya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi dapat membantu organisasi untuk mendefenisikan kemana organisasi untuk mendefenisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefenisikan bagaimana pelayana harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, bahwa Visi Kota Gunungsitoli adalah " **KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN BERDAYA SAING".**

Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dirumuskan dalam kebijakan Umum dan diformulasikan dalam empat perspektif yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa public, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada prespektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

3.2.2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataaan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Suatu Instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Pernyataan Visi diatas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan
3. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.

4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,professional dan melayani.
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya,religius dan taat hukum.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli, sesuai tugas dan fungsinya membantu Walikota Gunungsitoli dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli.
2. Pengkoordinasian tugas dan Fungsi Pemerintah Kota di bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli.
3. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Kota di bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli.
4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli berkontrribusi langsung dalam mendukung pencapaian **misi ke 1 (satu)** yaitu: *Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing*; dengan **strategi 3**; *Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender* dan **strategi 4;** *Penguatan kelembagaan perlindungan anak* .

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.

1. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan.
3. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang berbas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
4. Meningkatkan Kualitas hidup manusia Indonesia
5. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya.
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
7. Melakukan revolusi karakter bangsa.
8. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya **"Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia."** BKKBN berkomitmen akan turut mensukseskan Agenda Prioritas 5 (didalam Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas. Tujuan yang akan dicapai BKKBN dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas.
2. Peningkatan Pembinaan Peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MKJP.
3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
4. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) terdapat delapan strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam system Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
3. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah.

4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia.
5. Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana.
6. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah.
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.
8. Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKB .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sasaran strtegis BKKBN dalam upaya mencapai tujuan utama sebagai berikut:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka Kelarhiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

Selanjutnya, merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya **"Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya "** ada 2 (dua) mandat yang menjadi tugas dari PPPA yakni : 1) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan 2) Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marjinal.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kementrian PPPA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Kemen PP-PA.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) terdapat delapan strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

1. Strategi Eksternal.
   a. Melaksanakan review koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan agar berprespektif gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.
   b. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.
   c. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinerge antara K/L dan Pemda, antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan organisasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;
   d. Memperkuat system data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
   e. Meningkatkan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

2. Strategi Internal.
   a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;
   b. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Kemen PPPA dan Kinerja Pegawai;
   c. Meningkatkan kompetensi SDM Kemen PPPA secara proporsional dan akuntabel;
   d. Menerapkan prinsip-prinsip good governance di Kemen PPPA;
   e. Meningkatkan kualitas sarana,prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Kemen PPPA dan Pegawai
   f. Meningkatkan Kualitas Layanan Pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak;
   g. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan sinergi antar satuan kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sasaran strtegis Kemen PP-PA dalam upaya mencapai tujuan utama sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelaksanaan pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang.
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berb agai tindak kekerasan

3. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus
4. Meningkatnya perlindungan anak
5. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat.
6. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran
7. Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak
8. Meningkatkan pengembagan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA
9. Meningkatnya Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA.
10. Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pada Bagian ini dikemukakan apa saja Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dalam mendukung kebijakan pengembangan struktur ruang dan pengembangan pola ruang antara lain:

- Jumlah penduduk Gunungsitoli Tahun 2015 menurut angka proyeksi BPS Kota Gunungsitoli adalah sebanyak 135.995 Jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 66.515 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 69.480 jiwa, dengan sex ratio Kota Gunungsitoli sebesar 96 persen, artinya jika ada 96 laki-laki di Kota Gunungsitoli maka ada 100 perempuan di Kota Gunungsitoli pada tahun 2015
- Persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi seperti Kecamatan Gunungsitoli. Pada kecamatan tersebut kepadatan penduduk mencapai 591 jiwa setiap kilometer persegi.
- Kurangnya ruang bermain, berolah raga bagi anak dan remaja.
- Kurangnya jumlah zona selamat sekolah

Faktor Pendorong :

Adanya pembagian tata ruang yang jelas dari pemerintah daerah

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021)untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran dan realisasi program/kegiatan dalam periode renstra dapat dilihat pada tabel 5.1 Sedangkan strategi berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

- Pengendalian Penduduk
- Keluarga Berencana;
- Keluarga Sejahtera;
- Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB);
- Peningkatan Kualitas Hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
- Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- Peningkatan Kualitas Hidup dan Tumbuh kembang anak;
- Peningkatan Perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya
- Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI

4.1.1 Pernyataan Visi

Dalam rangka mendukung Visi Kota Gunungsitoli tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli menetapkan Visi:

"Terwujudnya Ketahanan Keluarga, Pengarusutamaan Gender dan Gunungsitoli Menuju Kota Layak Anak"

- **Terwujudnya** dimaksudkan terbukti, yang menjamin suatu usaha agar terlaksana.
- **Ketahanan Keluarga** dimaksudkan kondisi dinamik dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dan Kesejahteraan lahir dan batin.
- **Pengarusutamaan Gender** dimaksudkan merupakan suatu strategi untuk mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan, program, kegiatan daya memperhatikan Aspirasi, kebutuhan, manfaat dan permasalahan perempuan dan laki-laki yang berbeda kedalam perencanaan Pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program dan berbagai bidang kebudayaan dan pembangunan.
- **Kota Layak Anak yang selanjutanya disingkat KLA** dimaksudkan Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komimen dan sumber daya pemerintah , masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

4.1.2. Pernyataan Misi

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dan Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli, serta masukan-masukan dari

pihak yang berkepentingan (Stakeholeders), maka ditetapkan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas kelembagaan dan Upaya Perlindungan Anak.
2. Meningkatkan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan perlindungan perempuan.
3. Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5(lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta di dasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan stategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak.
2. Meningkatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan perlindungan perempuan.
3. Terkendalinya Laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya Keluarga Sejahtera.

4.2.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli ditetapkan empat sasaran strategis pada tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Terlaksananya Kebijakan Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.
2. Terlaksananya Cakupan Layanan Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan Perlindungan Perempuan.
3. Terlaksananya program kependudukan, Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Ketahanan Ekonomi Keluarga melalui peningkatan kelompok UPPKS.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana strategis dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli dalam Implementasinya berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli 2016-2021, maka strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan daerah agar berprespektif gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.
2. Peningkatan Kapasitas kelembagaan PUG dan Kelembagaan Perlindungan Perempuan.
3. Peningkatan Efektifitas kelembagaan perlindungan Anak.
4. Peningkatan Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak
5. Peningkatan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan
6. Peningkatan pelayanan yang mendukung pertumbuhan anak
7. Penguatan system Data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
8. Peningkatan Dukungan Pendanaan terhadap program dan kegiatan PUG.
9. Peningkatan Dukungan Pendanaan terhadap program dan kegiatan perlindungan Anak.
10. Peningkatan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah, antara pemerintah dan organisasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB, Kualitas Data Informasi Kependudukan dan Pemberdayaan ekonomi ketahanan keluarga.
12. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program Pembangunan pada urusan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli yaitu sebagai berikut *(Lihat tabel 5.1)*

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, *dengan rincian kegiatan sebagai berikut :*

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Telepon dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
5) Pengadaaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7) Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9) Penyediaan makanan dan minuman
10) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
11) Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah
12) Penyediaan Jasa Administrasi Umum
13) Penyediaan Jasa Tenaga Penyuluh Lapangan
14) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
15) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
16) Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat
17) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
18) Pengelolaan Administrasi Program Penunjang Dana Alokasi Khusus

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, *dengan rincian kegiatan sebagai berikut :*

1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
2) Pengadaan Meubelair
3) Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
4) Pengadaan Sewa Gedung Kantor
5) Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas Operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, *dengan rincian kegiatan sebagai berikut :*

1) Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, *dengan rincian kegiatan sebagai berikut :*

1) Penyusunan RENSTRA

Program Keluarga Berencana, *dengan rincian kegiatan sebagai berikut :*

1) Pembinaan PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD dalam mendukung penggarapan akseptor KB Baru
2) Pembinaan Klinik Keluarga Berencana (KKB)
3) Pemutakhiran Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
4) Pembinaan dan Pembentukan Kampung KB
5) Pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kecamatan
6) Pengadaan Mobil Antar Jemput Akseptor
7) Pengadaan Mobil Unit Pelayanan KB
8) Pengadaan Mobil Distribusi Alkon
9) Pembangunan Gudang Alkon
10) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
11) Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
12) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola dalam Analisis Dampak Kependudukan
13) Orientasi Teknis Penguatan Kelembagaan Analisis Dampak Kependudukan Kota Gunungsitoli

Program Pelayanan Kontrasepsi, *dengan rincian kegiatan sebagai berikut :*

1) Pelayanan KB Terpadu IBI KB KES
2) Pelayanan Kontrasepsi Terpadu Bhakti Sosial TNI KB KES
3) Pelaksanaan Kontrasepsi Bulan Bhakti PKK KB-KES
4) Dukungan terhadap pelaksanaan Safari KB dan Pelayanan Kontrasepsi MOW/MOP

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri *dengan rincian kegiatan sebagai berikut:*

1) Sosialisasi KIE, Advokasi dan Konseling KB/KR
2) Perayaan Hari Keluarga Nasional
3) Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
4) Sosialisasi Standarisasi Pelayanan KB

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR *dengan rincian kegiatan sebagai berikut :*

1) Sosialisasi dan promosi pemberdayaan ekonomi keluarga
2) Pembentukan dan Pembinaan PIK KRR
3) Pelatihan bagi Pengelola UPPKS Kota Gunungsitoli
4) Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
5) Pembinaan dan kesertaan ber-KB anggota Kelompok UPPKS

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak *dengan rincian kegiatan sebagai berikut:*

1. Sosialisasi dan Strategi Tata Laksana Bina Keluarga Balita (BKB) dan Anak
2. Pengembangan dan Pembinaan poktan BKB HI
3. Pemutakhiran Data Base poktan BKB HI
4. Peningkatan Sarana dan prasarana penyuluhan pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak
5. Peningkatan Kapasitas master trainer BKB di Kota Gunungsitoli
6. Peningkatan Kapasitas Kader Pintar
7. Pertemuan, Koordinasi dan Konsolidasi Pengelola BKB Kota Gunungsitoli

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga *dengan rincian kegiatan sebagai berikut :*

1) Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2) Pelatihan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU PADU *dengan rincian kegiatan sebagai berikut :*

1) Pengkajian Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU di Kota Gunungsitoli
2) Operasional Kader Posyandu Daerah di Kota Gunungsitoli

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan *dengan rincian kegiatan sebagai berikut :*

1) Sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Gunungsitoli
2) Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak
3) Pembinaan Forum Anak Kota Gunungsitoli dalam mendukung Pelaksanaan Kota Layak anak
4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak
5) Penyusunan Ranperda Perlindungan Anak
6) Pembentukan Desa Ramah Anak
7) Pelatihan dan Penerapan Aplikasi E-Kekerasan

8) Pembentukan Desa Binaan Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
9) Penyusunan Ranperda Pemenuhan Hak Anak
10) Penyusunan Ranperda Perlindungan Hak Anak
11) Pembuatan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin, Umur dan Kecamatan
12) Pembuatan Profil Anak Kota Gunungsitoli
13) Pembentukan Program Sayang Ibu dalam mendukung ketahanan Keluarga

Program Penguatan Kelembagaaan Pengarusutamaan Gender dan Anak *dengan rincian kegiatan sebagai berikut :*

1) Optimalisasi Pokja Pengarusutamaan Gender Kota Gunungsitoli
2) Perayaan Hari Keluarga Nasional
3) Perayaan Hari Anak Nasional
4) Pelaksanaan Bulan Balita dan generasi muda
5) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
6) Pembentukan rumah singgah anak korban kekerasan
7) Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)
8) Pembentukan tempat penitipan anak bagi PNS
9) Pembinaan Lembaga Berbasis Gender

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, *dengan rincian kegiatan sebagai berikut :*

1) Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan lain
2) Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan terhadap perempuan dan Anak
3) Pelatihan Penanganan Psikososial
4) Pelatihan Pendampingan dan Penanganan Hukum bagi Korban
5) Pelatihan tentang Penerimaan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan Anak
6) Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan *dengan rincian kegiatan sebagai berikut :*

1) Peringatan Hari Ibu
2) Peringatan Hari Kartini
3) Penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga Sejahtera
4) Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
5) Pameran Hasil Karya Perempuan di bidang Pembangunan
6) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
7) Pembinaan Lembaga Berbasis Gender
8) Pembinaan Desa Tertib Administrasi PKK
9) Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dan pembangunan sangatlah penting, untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 6.1. dibawah ini :

PENUTUP

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi,tujuan,strategi,kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021,merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian,Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Tabel 2.1

PENCAPAIAN PELAYANAN KINERJA SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA GUNUNGSITOLI

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian																			
1	Rasio Kebutuhan Administrasi Perkantoran	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-
2	Rasio Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-
3	Rasio Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-
4	Rasio Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-
5	Rasio Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
1	Penguatan Kapasitas dan Lembaga Perempuan di Tingkat Desa	0.00	0.00		10%	15%	15%	15%	20%	7%	7%	7%	7%	7%	70.00	46.67	46.67	46.67	35.00
2	Terlaksananya Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan anak pada tingkat kecamatan dan kota	0.00	0.00		10%	10%	15%	15%	15%	0%	0%	5%	5%	5%	-	-	33.33	33.33	33.33
3	Terlaksananya Sosialisasi dan advokasi tentang perempuan dan anak di 6 Kecamatan	0.00	0.00		10%	10%	10%	15%	15%	0%	0%	0%	5%	5%	-	-	-	33.33	33.33
4	Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan tentang Kesetaraan Gender di Tingkat Kecamatan dan Kota	0.00	0.00		9%	10%	15%	15%	15%	0%	0%	5%	5%	5%	-	-	33.33	33.33	33.33
5	Terlaksananya sosialisasi tentang regulasi perlindungan perempuan di tingkat kecamatan dan kota	0.00	0.00		10%	10%	15%	15%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																			
1	Terlaksananya Pelayanan Kepada 10.000 Akseptor KB	0.00	0.00		10%	10%	15%	15%	20%	10%	10%	15%	15%	20%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Tersedianya Dana Sharing Operasional PLKB dan Kades PPKBD sebanyak 200 Orang	0.00	0.00		10%	19%	20%	20%	20%	10%	19%	20%	20%	20%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi (MOW dan MOP) Sebanyak 300 Orang	0.00	0.00		10%	10%	15%	15%	20%	10%	10%	15%	15%	20%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Terlaksananya Penyuluhan (Sosialisasi) KB/KR di Tingkat Kecamatan dan Kota Gunungsitoli	0.00	0.00		9%	10%	10%	10%	15%	9%	10%	10%	10%	15%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Terlaksananya Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga Berencana di 6 Kecamatan	0.00	0.00		10%	10%	15%	15%	20%	10%	10%	15%	15%	20%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Terlaksananya Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR sebanyak 100 Kelompok	0.00	0.00		9%	10%	10%	10%	10%	9%	10%	10%	10%	10%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Tersedianya Fasilitasi sarana BKB KIT dan APE Sebanyak 30 Unit	0.00	0.00		5%	5%	10%	15%	15%	0%	0%	10%	0%	0%	-	-	100.00	-	-

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA GUNUNGSITOLI

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran PadaTahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
I	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan					Rp 29,910,000					29,910,000	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
II	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	Rp 41,000,000	Rp 65,000,000	Rp 221,450,400	Rp 568,000,000	Rp 545,056,000	39,650,000	64,947,000	218,554,900	425,258,200	539,515,100	96.71	99.92	98.69	74.87	98.98		
III	Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraaan gender dalam pembangunan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 560,000,000	Rp 359,580,000	-	-	-	454,820,000	278,785,600	0.00	0.00	0.00	81.22	77.53		
IV	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
V	Program Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan Lembaga Masyarakat	Rp -	Rp 485,000,000	Rp 1,145,000,000	Rp -	Rp -	-	456,132,200	Rp 791,110,400	-	-	0.00	94.05	69.09	0.00	0.00		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																	
I	**Program Keluarga Berencana**	Rp 67,500,000	Rp 148,000,000	Rp 803,051,725	Rp 931,748,000	Rp 1,863,199,291	49,332,000	132,468,600	205,762,800	156,253,000	1,847,557,000	73.08	89.51	25.62	16.77	99.16		
II	**Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri**			Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 29,910,000			30,000,000	29,955,000	29,860,000	0.00	-	-	99.85	99.83		
III	**Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR**	Rp -	Rp -	Rp 60,000,000	Rp 30,000,000	Rp 89,865,000			59,875,000	29,775,000	89,765,000	0.00	-	99.79	-	99.89		
IV	**Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat**	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
V	**Program Pengembangan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak**	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00		
VI	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00		
VII	**Program Pelayan Kontrasepsi**	Rp 30,000,000	Rp 55,000,000	Rp 178,200,000	Rp 150,000,000	Rp 219,370,000	30,000,000	54,212,500	175,300,000	148,850,000	135,860,000	100.00	98.57	98.37	99.23	61.93		
VIII	**Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS**	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00		
IX	**Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00		
X	**Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU**	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00		
	Total……..	**138,500,000**	**753,000,000**	**2,437,702,125**	**2,269,748,000**	**3,136,890,291**	**118,982,000**	**707,760,300**	**1,480,603,100**	**1,244,911,200**	**2,951,252,700**							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kelembangaan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak	Terlaksananya Kebijakan Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	1 Meningkatnya Upaya Perlindungan terhadap hak-hak anak	60%	60%	65%	70%	75%	75%
			2 Meningkatnya Pelayanan yang mendukung pertumbuhan Anak	20%	30%	40%	50%	60%	70%
			3 Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak	10%	20%	30%	40%	50%	60%
2	Meningkatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan Perlindungan Perempuan	Terlaksananya Cakupan layanan pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan perlindungan perempuan	1 Adanya Peningkatan yang signifikan Cakupan layanan Pengarusutamaan Gender	10%	35%	45%	55%	65%	75%
			2 Meningkatnya kapasitas kesetaraan Gender penyelenggaraan pemerintahan	28%	30%	35%	37%	40%	45%
			3 Meningkatnya daya saing kelembagaan PUG	5%	25%	35%	45%	55%	60%
3	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Terlaksananya program kependudukan, Keluarga Berencana	Rata-Rata Anak Per Keluarga	4,34	4,34	4.02	3.70	3.38	3.00
			Rasio Akseptor KB	61%	61%	62%	63%	64%	65%
			Cakupan Peserta KB Aktif	68%	68%	72%	76%	80%	80%
4	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Pemberdayaan Ketahanan Ekonomi Keluarga melalui peningkatan Kelompok UPPKS	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	60%	60%	6%	6%	8%	80%

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal 2016	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kelembangaan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak	Terlaksananya Kebijakan Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	1 Meningkatnya Upaya Perlindungan terhadap hak-hak anak	60%	60%	65%	70%	75%	75%
			2 Meningkatnya Pelayanan yang mendukung pertumbuhan Anak	20%	30%	40%	50%	60%	70%
			3 Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak	10%	20%	30%	40%	50%	60%
2	Meningkatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan Perlindungan Perempuan	Terlaksananya Cakupan layanan pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan perlindungan perempuan	1 Adanya Peningkatan yang signifikan Cakupan layanan Pengarusutamaan Gender	10%	35%	45%	55%	65%	75%
			2 Meningkatnya kapasitas kesetaraan Gender penyelenggaraan pemerintahan	28%	30%	35%	37%	40%	45%
			3 Meningkatnya daya saing kelembagaan PUG	5%	25%	35%	45%	55%	60%
3	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Terlaksananya program kependudukan, Keluarga Berencana	Rata-Rata Anak Per Keluarga	4,34	4.34	4.02	3.70	3.38	3.00
			Rasio Akseptor KB	61%	61%	62%	63%	64%	65%
			Cakupan Peserta KB Aktif	68%	68%	72%	76%	80%	80%
4	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Pemberdayaan Ketahanan Ekonomi Keluarga melalui peningkatan Kelompok UPPKS	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	60%	60%	6%	6%	8%	80%

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kelembangaan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak	Terlaksananya Kebijakan Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	1 Meningkatnya Upaya Perlindungan terhadap hak-hak anak	60%	60%	65%	70%	75%	75%
			2 Meningkatnya Pelayanan yang mendukung pertumbuhan Anak	20%	30%	40%	50%	60%	70%
			3 Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak	10%	20%	30%	40%	50%	60%
2	Meningkatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan Perlindungan Perempuan	Terlaksananya Cakupan layanan pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan perlindungan perempuan	1 Adanya Peningkatan yang signifikan Cakupan layanan Pengarusutamaan Gender	10%	35%	45%	55%	65%	75%
			2 Meningkatnya kapasitas kesetaraan Gender penyelenggaraan pemerintahan	28%	30%	35%	37%	40%	45%
			3 Meningkatnya daya saing kelembagaan PUG	5%	25%	35%	45%	55%	60%
3	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Terlaksananya program kependudukan, Keluarga Berencana	Rata-Rata Anak Per Keluarga	4,34	4,34	4.02	3.70	3.38	3.00
			Rasio Akseptor KB	61%	61%	62%	63%	64%	65%
			Cakupan Peserta KB Aktif	68%	68%	72%	76%	80%	80%
4	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Pemberdayaan Ketahanan Ekonomi Keluarga melalui peningkatan Kelompok UPPKS	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	60%	60%	6%	6%	8%	80%

Tabel 5.1.
ANGGARAN PENDANAAN PELAYANAN SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA GUNUNGSITOLI

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	No	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Anggaran Pada Tahun Ke-										Kondisi kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung-Jawab	Lokasi
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli																
Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat.	Meningkatnya angka kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan.		**I**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran**	**0.00%**	**75.00%**	**Rp 750,000,000**	**76.00%**	**Rp 751,500,000**	**77.00%**	**Rp 753,003,000**	**78.00%**	**Rp 828,303,300**	**79.00%**	**Rp 829,959,907**	**79%**	**Rp 3,912,766,207**	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli	KOTA GUNUNGSITOLI
				1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Biaya Pengadaan Materi Perangko dan Benda Pos Lainnya		1 Tahun	Rp 2,000,000	1 Tahun	Rp 2,004,000	1 Tahun	Rp 2,008,008	1 Tahun	Rp 2,208,809	1 Tahun	Rp 2,213,226	1 Tahun	Rp 10,434,043		
				2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, telepon dan listrik	Tersedianya rekening telepon dan fax, listrik, air, internet		1 Tahun	Rp 6,000,000	1 Tahun	Rp 6,012,000	1 Tahun	Rp 6,024,024	1 Tahun	Rp 6,626,426	1 Tahun	Rp 6,639,679	1 Tahun	Rp 31,302,130		
				3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional	Tersedianya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 Tahun	Rp 9,250,000	1 Tahun	Rp 9,268,500	1 Tahun	Rp 9,287,037	1 Tahun	Rp 10,215,741	1 Tahun	Rp 10,236,172	1 Tahun	Rp 48,257,450		
				4	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		1 Tahun	Rp 25,000,000	1 Tahun	Rp 25,050,000	1 Tahun	Rp 25,100,100	1 Tahun	Rp 27,610,110	1 Tahun	Rp 27,665,330	1 Tahun	Rp 130,425,540		
				5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan/Fotocopy		1 Tahun	Rp 15,000,000	1 Tahun	Rp 15,030,000	1 Tahun	Rp 15,060,060	1 Tahun	Rp 16,566,066	1 Tahun	Rp 16,599,198	1 Tahun	Rp 78,255,324		
				6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen dan Instalasi Listrik /bangunan Kantor		1 Tahun	Rp 2,000,000	1 Tahun	Rp 2,004,000	1 Tahun	Rp 2,008,008	1 Tahun	Rp 2,208,809	1 Tahun	Rp 2,213,226	1 Tahun	Rp 10,434,043		
				7	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor		1 Tahun	Rp 2,500,000	1 Tahun	Rp 2,505,000	1 Tahun	Rp 2,510,010	1 Tahun	Rp 2,761,011	1 Tahun	Rp 2,766,533	1 Tahun	Rp 13,042,554		
				8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya rekening dan surat kabar dan buku-buku peraturan perundang-undangan		1 Tahun	Rp 3,000,000	1 Tahun	Rp 3,006,000	1 Tahun	Rp 3,012,012	1 Tahun	Rp 3,313,213	1 Tahun	Rp 3,319,840	1 Tahun	Rp 15,651,065		
			1.12.1	9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai		1 Tahun	Rp 30,000,000	1 Tahun	Rp 30,060,000	1 Tahun	Rp 30,120,120	1 Tahun	Rp 33,132,132	1 Tahun	Rp 33,198,396	1 Tahun	Rp 156,510,648		
				10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		1 Tahun	Rp 70,000,000	1 Tahun	Rp 70,140,000	1 Tahun	Rp 70,280,280	1 Tahun	Rp 77,308,308	1 Tahun	Rp 77,462,925	1 Tahun	Rp 365,191,513		

			11	Monitoring/ survey/ pengawasan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Monitoring/ survey/ pengawasan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		1 Tahun	Rp	40,000,000	1 Tahun	Rp	40,080,000	1 Tahun	Rp	40,160,160	1 Tahun	Rp	44,176,176	1 Tahun	Rp	44,264,528	1 Tahun	Rp	208,680,864		
			12	Penyediaan jasa administrasi umum	Terpenuhinya Honor Pejabat/Staf Pengelola Keuangan		1 Tahun	Rp	50,000,000	1 Tahun	Rp	50,100,000	1 Tahun	Rp	50,200,200	1 Tahun	Rp	55,220,220	1 Tahun	Rp	55,330,660	1 Tahun	Rp	260,851,080		
			13	Penyediaan Jasa Tenaga Penyuluh Lapangan	Terpenuhinya Honor bagi tenaga penyuluh Lapangan		1 Tahun	Rp	384,000,000	1 Tahun	Rp	384,768,000	1 Tahun	Rp	385,537,536	1 Tahun	Rp	424,091,290	1 Tahun	Rp	424,939,472	1 Tahun	Rp	2,003,336,298		
			14	Penyediaan Jasa Keamanan kantor	Tersedianya upah tenaga Jaga malam		1 Tahun	Rp	19,200,000	1 Tahun	Rp	19,238,400	1 Tahun	Rp	19,276,877	1 Tahun	Rp	21,204,564	1 Tahun	Rp	21,246,974	1 Tahun	Rp	100,166,815		
			15	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya upah jasa kebersihan		1 Tahun	Rp	19,200,000	1 Tahun	Rp	19,238,400	1 Tahun	Rp	19,276,877	1 Tahun	Rp	21,204,564	1 Tahun	Rp	21,246,974	1 Tahun	Rp	100,166,815		
			16	Penyediaan jasa supir/kemet/operator alat berat	Tersedianya upah jasa supir/kemet/operator alat berat		1 Tahun	Rp	22,800,000	1 Tahun	Rp	22,845,600	1 Tahun	Rp	22,891,291	1 Tahun	Rp	25,180,420	1 Tahun	Rp	25,230,781	1 Tahun	Rp	118,948,093		
			17	Penyediaan jasa administrasi kantor	Tersedianya upah jasa administrasi kantor		1 Tahun	Rp	19,200,000	1 Tahun	Rp	19,238,400	1 Tahun	Rp	19,276,877	1 Tahun	Rp	21,204,564	1 Tahun	Rp	21,246,974	1 Tahun	Rp	100,166,815		
			18	Pengelolaan Administrasi Program Penunjang Dana Alokasi Khusus	Terlaksananya Program Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)		1 Tahun	Rp	30,850,000	1 Tahun	Rp	30,911,700	1 Tahun	Rp	30,973,523	1 Tahun	Rp	34,070,876	1 Tahun	Rp	34,139,017	1 Tahun	Rp	160,945,117		
Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			**II**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Peningkatan Kinerja pelayanan aparatur**	**0.00%**	**75.00%**	**Rp**	**130,000,000**	**76.00%**	**Rp**	**130,260,000**	**77.00%**	**Rp**	**130,520,520**	**78.00%**	**Rp**	**143,572,572**	**79.00%**	**Rp**	**143,859,717**	**79%**	**Rp**	**678,212,809**		
			1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		1 Tahun	Rp	17,000,000	1 Tahun	Rp	17,034,000	1 Tahun	Rp	17,068,068	1 Tahun	Rp	18,774,875	1 Tahun	Rp	18,812,425	1 Tahun	Rp	88,689,367		
			2	Pengadaan meubelair	Tersedianya meubelair kantor		1 Tahun	Rp	18,000,000	1 Tahun	Rp	18,036,000	1 Tahun	Rp	18,072,072	1 Tahun	Rp	19,879,279	1 Tahun	Rp	19,919,038	1 Tahun	Rp	93,906,389		
			3	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		1 Tahun	Rp	10,000,000	1 Tahun	Rp	10,020,000	1 Tahun	Rp	10,040,040	1 Tahun	Rp	11,044,044	1 Tahun	Rp	11,066,132	1 Tahun	Rp	52,170,216		
			4	Sewa gedung kantor	Tersedianya sewa gedung kantor		1 Tahun	Rp	70,000,000	1 Tahun	Rp	70,140,000	1 Tahun	Rp	70,280,280	1 Tahun	Rp	77,308,308	1 Tahun	Rp	77,462,925	1 Tahun	Rp	365,191,513		
			5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		1 Tahun	Rp	15,000,000	1 Tahun	Rp	15,030,000	1 Tahun	Rp	15,060,060	1 Tahun	Rp	16,566,066	1 Tahun	Rp	16,599,198	1 Tahun	Rp	78,255,324		

		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		**III**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Peningkatan Kinerja pelayanan aparatur**	**0.00%**	**75.00%**	**Rp**	**50,000,000**	**80.00%**	**Rp**	**50,100,000**	**85.00%**	**Rp**	**50,200,200**	**90.00%**	**Rp**	**55,220,220**	**95.00%**	**Rp**	**57,981,231**	**95%**	**Rp**	**263,501,651**
				1	Mengikuti diklat/bimtek/seminar/workshop/sosialisasi	Tersedianya biaya untuk mengikuti diklat/bimtek/seminar/workshop/sosialisasi di dalam/dii luar daerah		1 Tahun	Rp	50,000,000	1 Tahun	Rp	50,100,000	1 Tahun	Rp	50,200,200	1 Tahun	Rp	55,220,220	1 Tahun	Rp	57,981,231	1 Tahun	Rp	263,501,651
		Peningkatan Sistem Pengembangan pelaporan Keuangan		**IV**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Peningkatan Kinerja pelayanan aparatur**	**0.00%**	**0.00%**	**Rp**	**-**	**0.00%**	**Rp**	**-**	**0.00%**	**Rp**	**-**	**0.00%**	**Rp**	**-**	**80.00%**	**Rp**	**10,000,000**	1 Keg.	**Rp**	**10,000,000**
				1	Penyusunan Renstra	Terlaksananya penyusunan Rencana Program dan Kegiatan 5 Tahunan		0.00%	Rp	-	0.00%	Rp	-	0.00%	Rp	-	0.00%	Rp	-	80.00%	Rp	10,000,000	1 Keg.	Rp	10,000,000
			II.H	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																					
			1.12	**KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**																					
Terwujudnya Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Terlaksananya program kependudukan, Keluarga Berencana	Peningkatan Pelayanan kepada Akseptor KB		**05**	**Program Keluarga Berencana**	**Rasio Akseptor KB (%)**	**60.00%**	**65.00%**	**Rp**	**681,156,000**	**65.00%**	**Rp**	**682,518,312**	**65.00%**	**Rp**	**683,883,349**	**65.00%**	**Rp**	**752,271,683**	**65.00%**	**Rp**	**789,885,268**	**65.00%**	**Rp**	**3,589,714,612**
				1	Pembinaan PLKB,PPKBD dan Sub PPKBD dalam mendukung penggarapan akseptor KB baru	Terlaksananya Pembinaan PLKB,PPKBD dan Sub PPKBD dalam mendukung penggarapan akseptor KB baru		1 Keg.	Rp	180,000,000	1 Keg.	Rp	160,320,000	1 Keg.	Rp	160,640,640	1 Keg.	Rp	250,000,000	1 Keg.	Rp	262,500,000	1 Keg.	Rp	1,013,460,640
				2	Pembinaan Klinik Keluarga Berencana (KKB)	Terlaksananya Pembinaan Klinik Keluarga Berencana (KKB)		1 Keg.	Rp	12,156,000	1 Keg.	Rp	12,180,312	1 Keg.	Rp	12,204,673	1 Keg.	Rp	80,000,000	1 Keg.	Rp	84,000,000	1 Keg.	Rp	200,540,985
				3	Pemutakhiran Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Terlaksananya Pemutakhiran Data Mikro Kependudukan dan Keluarga		1 Keg.	Rp	10,000,000	1 Keg.	Rp	10,020,000	1 Keg.	Rp	10,040,040	1 Keg.	Rp	80,000,000	1 Keg.	Rp	84,000,000	1 Keg.	Rp	194,060,040
				4	Pembinaan dan Pembentukan Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan Kampung KB		1 Keg.	Rp	15,000,000	1 Keg.	Rp	15,030,000	1 Keg.	Rp	15,060,060	1 Keg.	Rp	80,000,000	1 Keg.	Rp	84,000,000	1 Keg.	Rp	209,090,060
				5	Pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kecamatan	Terlaksananya Pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Gunungsitoli Selatan		1 Keg.	Rp	200,000,000		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-	1 Keg.	Rp	200,000,000
				6	Pengadaan Mobil Antar Jemput Akseptor	Terlaksananya Pengadaan Mobil Antar Jemput Akseptor		1 Keg.	Rp	100,000,000		Rp	-		Rp	-		Rp	-		Rp	-	1 Keg.	Rp	100,000,000
				7	Pengadaan Mobil Pelayanan MUYAN	Terlaksananya Pengadaan Mobil Pelayanan MUYAN			Rp	-		Rp	-	1 Keg.	Rp	321,281,280	1 Keg.	Rp	-		Rp	-	1 Keg.	Rp	321,281,280

		8	Pengadaan Mobil Distribusi Alkon	Terlaksananya Pengadaan Mobil Distribusi Alokon			Rp -	1 Keg.	Rp 160,000,000		Rp -		Rp -		Rp -	1 Keg.	Rp 160,000,000
		9	Pembangunan Gudang Alokon	Terlaksananya Pembangunan Gudang Alokon			Rp -	1 Keg.	Rp 160,640,000		Rp -		Rp -		Rp -	1 Keg.	Rp 160,640,000
		10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Terlaksananya Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)		1 Keg.	Rp 74,000,000	1 Keg.	Rp 74,148,000	1 Keg.	Rp 74,296,296	1 Keg.	Rp 100,000,000	1 Keg.	Rp 105,000,000	1 Keg.	Rp 427,444,296
		11	Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		1 Keg.	Rp 30,000,000	1 Keg.	Rp 30,060,000	1 Keg.	Rp 30,120,120	1 Keg.	Rp 62,271,683	1 Keg.	Rp 65,385,268	1 Keg.	Rp 217,837,071
		12	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola dalam Analisis Dampak Kependudukan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola dalam Analisis Dampak Kependudukan		1 Keg.	Rp 30,000,000	1 Keg.	Rp 30,060,000	1 Keg.	Rp 30,120,120	1 Keg.	Rp 50,000,000	1 Keg.	Rp 52,500,000	1 Keg.	Rp 192,680,120
		13	Orientasi Teknis Penguatan Kelembagaan Analisis Dampak Kependudukan Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Orientasi Teknis Penguatan Kelembagaan Analisis Dampak Kependudukan Kota Gunungsitoli		1 Keg.	Rp 30,000,000	1 Keg.	Rp 30,060,000	1 Keg.	Rp 30,120,120	1 Keg.	Rp 50,000,000	1 Keg.	Rp 52,500,000	1 Keg.	Rp 192,680,120
Meningkatnya Pelayanan Pemakaian Alat Kontrasepsi		**06**	**Program Pelayanan Kontrasepsi**	**Persentase Pencapaian Peserta KB Baru menurut Jenis Kontarasepsi (%)**	**60.00%**	**65.00%**	**Rp 140,000,000**	**70.00%**	**Rp 140,280,000**	**75.00%**	**Rp 140,560,560**	**77.00%**	**Rp 154,616,616**	**80.00%**	**Rp 162,347,447**	**85.00%**	**Rp 737,804,623**
		1	Pelayanan Kontrasepsi KB Terpadu IBI KB-KES	Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi KB Terpadu IBI KB-KES		1Keg	Rp 35,000,000	1Keg	Rp 35,070,000	1Keg	Rp 35,140,140	1Keg	Rp 38,654,154	1Keg	Rp 40,586,862	1Keg	Rp 184,451,156
		2	Pelayanan Kontrasepsi Terpadu Bhakti Sosial TNI KB-KES	Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi Terpadu Bhakti Sosial TNI KB-KES		1Keg	Rp 35,000,000	1Keg	Rp 35,070,000	1Keg	Rp 35,140,140	1Keg	Rp 38,654,154	1Keg	Rp 40,586,862	1Keg	Rp 184,451,156
		3	Pelayanan Kontrasepsi Bulan Bhakti PKK KB-KES	Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi Bulan Bhakti PKK KB-KES		1Keg	Rp 35,000,000	1Keg	Rp 35,070,000	1Keg	Rp 35,140,140	1Keg	Rp 38,654,154	1Keg	Rp 40,586,862	1Keg	Rp 184,451,156
		4	Dukungan Terhadap Pelaksanaan Safari KB dan Pelayanan Kontrasepsi MOW/MOP	Terlaksananya Dukungan Terhadap Pelaksanaan Safari KB dan Pelayanan Kontrasepsi MOW/MOP		1Keg	Rp 35,000,000	1Keg	Rp 35,070,000	1Keg	Rp 35,140,140	1Keg	Rp 38,654,154	1Keg	Rp 40,586,862	1Keg	Rp 184,451,156
Meningkatnya Pembinaan dan kesertaan ber-KB		**07**	**Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	**Rasio Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	**5.00%**	**20.00%**	**Rp 75,000,000**	**35.00%**	**Rp 75,150,000**	**50.00%**	**Rp 75,300,300**	**65.00%**	**Rp 82,830,330**	**80.00%**	**Rp 86,971,847**	**80.00%**	**Rp 395,252,477**
		1	Sosialisasi KIE,Advokasi dan Konseling KB/KR	Terlaksananya Sosialisasi KIE,Advokasi dan Konseling KB/KR		1 Keg.	Rp 18,750,000	1 Keg.	Rp 18,787,500	1 Keg.	Rp 18,825,075	1 Keg.	Rp 20,707,583	1 Keg.	Rp 21,742,962	1 Keg.	Rp 98,814,100
		2	Perayaan Hari Keluarga Nasional	Terlaksananya Perayaan Hari Keluarga Nasional		1 Keg.	Rp 18,750,000	1 Keg.	Rp 18,787,500	1 Keg.	Rp 18,825,075	1 Keg.	Rp 20,707,583	1 Keg.	Rp 21,742,962	1 Keg.	Rp 98,814,100

		3	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB		1 Keg.	Rp	18,750,000	1 Keg.	Rp	18,787,500	1 Keg.	Rp	18,825,075	1 Keg.	Rp	20,707,583	1 Keg.	Rp	21,742,962	1 Keg.	Rp	98,814,100
		4	Sosialisasi Standarisasi Pelayanan KB	Terlaksananya Sosialisasi Standarisasi Pelayanan KB		1 Keg.	Rp	18,750,000	1 Keg.	Rp	18,787,500	1 Keg.	Rp	18,825,075	1 Keg.	Rp	20,707,583	1 Keg.	Rp	21,742,962	1 Keg.	Rp	98,810,177
Meningkatnya Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber-KB		**08**	**Program Pengembangan Pusat Informasi Konseling KRR**	**Rasio Upaya Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (%)**	**0.00%**	**20.00%**	**Rp**	**75,000,000**	**40.00%**	**Rp**	**75,150,000**	**60.00%**	**Rp**	**75,300,300**	**80.00%**	**Rp**	**82,830,330**	**100.00%**	**Rp**	**86,971,847**	**100.00%**	**Rp**	**395,252,477**
		1	Sosialisasi dan promosi pemberdayaan ekonomi keluarga	Terlaksananya Sosialisasi dan promosi pemberdayaan ekonomi keluarga		1 Keg.	Rp	15,000,000	1 Keg.	Rp	15,030,000	1 Keg.	Rp	15,060,060	1 Keg.	Rp	16,566,066	1 Keg.	Rp	17,394,369	1 Keg.	Rp	79,000,000
		2	Pembentukan dan Pembinaan PIK KRR	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan PIK KRR		1 Keg.	Rp	15,000,000	1 Keg.	Rp	15,030,000	1 Keg.	Rp	15,060,060	1 Keg.	Rp	16,566,066	1 Keg.	Rp	17,394,369	1 Keg.	Rp	79,000,000
		3	Pelatihan Bagi Pengelola UPPKS Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pengelola UPPKS Kota Gunungsitoli		1 Keg.	Rp	15,000,000	1 Keg.	Rp	15,030,000	1 Keg.	Rp	15,060,060	1 Keg.	Rp	16,566,066	1 Keg.	Rp	17,394,369	1 Keg.	Rp	79,000,000
		4	Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		1 Keg.	Rp	15,000,000	1 Keg.	Rp	15,030,000	1 Keg.	Rp	15,060,060	1 Keg.	Rp	16,566,066	1 Keg.	Rp	17,394,369	1 Keg.	Rp	79,252,477
		5	Pembinaan dan kesertaan ber-KB Anggota Kelompok UPPKS	Terlaksananya Pembinaan dan kesertaan ber-KB Anggota Kelompok UPPKS		1 Keg.	Rp	15,000,000	1 Keg.	Rp	15,030,000	1 Keg.	Rp	15,060,060	1 Keg.	Rp	16,566,066	1 Keg.	Rp	17,394,369	1 Keg.	Rp	79,000,000
Meningkatnya Pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) Keluarga Balita dan anak dalam Pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak		**09**	**Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak**	**Rasio Upaya Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak %)**	**0.00%**	**15.00%**	**Rp**	**80,000,000**	**30.00%**	**Rp**	**80,160,000**	**55.00%**	**Rp**	**80,320,320**	**75.00%**	**Rp**	**88,352,352**	**75.00%**	**Rp**	**92,769,970**	**75.00%**	**Rp**	**421,602,642**
		1	Sosialisasi Strategi Tata Laksana Bina Keluarga Balita (BKB) dan Anak	Terlaksananya Sosialisasi Strategi Tata Laksana Bina Keluarga Balita (BKB) dan Anak		1 Keg.	Rp	12,500,000	1 Keg.	Rp	12,525,000	1 Keg.	Rp	12,550,050	1 Keg.	Rp	13,805,055	1 Keg.	Rp	14,495,308	1 Keg.	Rp	65,875,413
		2	Pengembangan dan Pembinaan Poktan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI)	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Poktan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI)		1 Keg.	Rp	12,500,000	1 Keg.	Rp	12,525,000	1 Keg.	Rp	12,550,050	1 Keg.	Rp	13,805,055	1 Keg.	Rp	14,495,308	1 Keg.	Rp	65,875,413
		3	Pemutakhiran Data Base Poktan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI)	Terlaksananya Pemutakhiran Data Base Poktan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI)		1 Keg.	Rp	15,000,000	1 Keg.	Rp	15,030,000	1 Keg.	Rp	15,060,060	1 Keg.	Rp	16,566,066	1 Keg.	Rp	17,394,369	1 Keg.	Rp	79,050,495
		4	Peningkatan Sarana dan prasarana penyuluhan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dhi : BKB KIT dan APE	Tersedianya Sarana dan prasarana penyuluhan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dhi : BKB KIT dan APE		1 Keg.	Rp	10,000,000	1 Keg.	Rp	10,020,000	1 Keg.	Rp	10,040,040	1 Keg.	Rp	11,044,044	1 Keg.	Rp	11,596,246	1 Keg.	Rp	52,700,330
		5	Peningkatan Kapasitas master trainer BKB di Kota Gunungsitoli	Meningkatnya Kapasitas master trainer BKB di Kota Gunungsitoli		1 Keg.	Rp	10,000,000	1 Keg.	Rp	10,020,000	1 Keg.	Rp	10,040,040	1 Keg.	Rp	11,044,044	1 Keg.	Rp	11,596,246	1 Keg.	Rp	52,700,330

				6	Peningkatan Kapasitas Kader Pintar	Meningkatnya Kapasitas Kader Pintar		1 Keg.	Rp 10,000,000	1 Keg.	Rp 10,020,000	1 Keg.	Rp 10,040,040	1 Keg.	Rp 11,044,044	1 Keg.	Rp 11,596,246	1 Keg.	Rp 52,700,330		
				7	Pertemuan, Koordinasi dan Konsolidasi Pengelola BKB Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pertemuan, Koordinasi dan Konsolidasi Pengelola BKB Kota Gunungsitoli		1 Keg.	Rp 10,000,000	1 Keg.	Rp 10,020,000	1 Keg.	Rp 10,040,040	1 Keg.	Rp 11,044,044	1 Keg.	Rp 11,596,246	1 Keg.	Rp 52,700,330		
		Terlaksananya Program Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		**10**	**Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**	**Rasio Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (%)**	**0.00%**	**15.00%**	**Rp 80,000,000**	**30.00%**	**Rp 80,160,000**	**35.00%**	**Rp 80,320,320**	**50.00%**	**Rp 88,352,352**	**80.00%**	**Rp 92,769,970**	**80.00%**	**Rp 421,602,642**		
				1	Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terbinanya Kelompok Tribina: Bina Keluarga Balita (BKB):Bina Keluarga Remaja (BKR):Bina Keluarga Remaja (BKR):Bina Keluarga Lansia (BKL) dan UPPKS		1 Keg.	Rp 40,000,000	1 Keg.	Rp 40,080,000	1 Keg.	Rp 40,160,160	1 Keg.	Rp 44,176,176	1 Keg.	Rp 46,384,985	1 Keg.	Rp 210,801,321		
				2	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		1 Keg.	Rp 40,000,000	1 Keg.	Rp 40,080,000	1 Keg.	Rp 40,160,160	1 Keg.	Rp 44,176,176	1 Keg.	Rp 46,384,985	1 Keg.	Rp 210,801,321		
		Terlaksananya Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU PADU		**11**	**Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU PADU**	**Rasio Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU PADU (%)**	**0.00%**	**15.00%**	**Rp 75,000,000**	**30.00%**	**Rp 75,150,000**	**45.00%**	**Rp 75,300,300**	**60.00%**	**Rp 82,830,330**	**75.00%**	**Rp 86,971,847**	**75.00%**	**Rp 395,252,477**		
				1	Pengkajian Pengembangan model opersional BKB-Posyandu-PADU di Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pengkajian Pengembangan model opersional BKB-Posyandu-PADU di Kota Gunungsitoli		1 Keg.	Rp 35,000,000	1 Keg.	Rp 35,070,000	1 Keg.	Rp 35,140,140	1 Keg.	Rp 38,654,154	1 Keg.	Rp 40,586,862	1 Keg.	Rp 184,451,156		
				2	Operasional Kader Posyandu Daerah di Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Operasional Kader Posyandu Daerah di Kota Gunungsitoli		1 Keg.	Rp 40,000,000	1 Keg.	Rp 40,080,000	1 Keg.	Rp 40,160,160	1 Keg.	Rp 44,176,176	1 Keg.	Rp 46,384,985	1 Keg.	Rp 210,801,321		
				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
					PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Terwujudnya Pembangunan yang Responsive Gender ,Perlindungan Perempuan dan Anak	Terlaksananya Pembangunan yang Responsive Gender ,Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Kualitas dan cakupan perlindungan terhadap hak-hak anak		**02**	**Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	**Jumlah Kebijakan daerah untuk peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	**10.00%**	**15.00%**	**Rp 126,251,023**	**15.00%**	**Rp 126,503,525**	**20.00%**	**Rp 126,756,532**	**20.00%**	**Rp 139,432,185**	**80.00%**	**Rp 146,403,795**	**80.00%**	**Rp 665,347,060**		
				1	Sosialisasi Undang-Undang No.23 tentang Peerlindungan Anak di Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang No.23 tentang Peerlindungan Anak di Kota Gunungsitoli			Rp -	1 Keg.	Rp 30,903,525		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 30,903,525		
				2	Pembentukan GugusTugas Kota Layak Anak	Terlaksananya Pembentukan GugusTugas Kota Layak Anak		1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp -		Rp -		Rp -		**Rp -**		Rp 12,600,000		
				3	Pembinaan Forum Anak Kota Gunungsitoli dalam mendukung Pelaksanaan Kota Layak Anak	Terlaksananya Pembinaan Forum Anak Kota Gunungsitoli dalam mendukung Pelaksanaan Kota Layak Anak		1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 48,956,532	1 Keg.	Rp 61,632,185	1 Keg.	Rp 56,003,795	1 Keg.	Rp 191,792,512		

		4	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak	Terlaksananya Pembuatan RAD Kota Layak Anak		1 Keg.	Rp 12,600,000		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		Rp 12,600,000
		5	Penyusunan Ranperda Perlindungan Anak	Tersusunya Ranperda Perlindungan Anak		1 Keg.	Rp 12,851,023		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		Rp 12,851,023
		6	Pembentukan Desa Ramah Anak	Terlaksananya Pembentukan Desa Ramah Anak		1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 20,000,000	1 Keg.	Rp 20,000,000	1 Keg.	Rp 20,000,000	1 Keg.	Rp 85,200,000
		7	Pelatihan dan Penerapan Aplikasi E-Kekerasan	Terlaksananya Pelatihan dan Penerapan Aplikasi E-Kekerasan		1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 20,000,000	1 Keg.	Rp 20,000,000	1 Keg.	Rp 20,000,000	1 Keg.	Rp 85,200,000
		8	Pembentukan Desa Binaan Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Terlaksananya Pembentukan Desa Binaan Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)		1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 63,000,000
		9	Penyusunan Ranperda Pemenuhan Hak Anak	Terlaksananya Penyusunan Ranperda Pemenuhan Hak Anak		1 Keg.	Rp -	1 Keg.	Rp 10,000,000		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		Rp 10,000,000
		10	Penyusunan Ranperda Pemenuhan Perlindungan Hak Anak	Terlaksananya Penyusunan Ranperda Pemenuhan Perlindungan Hak Anak		1 Keg.	Rp -	1 Keg.	Rp 10,000,000		**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**		Rp 10,000,000
		11	Pembuatan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin, Umur dan Kecamatan	Terlaksananya Pembuatan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin, Umur dan Kecamatan		1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 63,000,000
		12	Pembuatan Profil Anak Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pembuatan Profil Anak Kota Gunungsitoli		1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp -		Rp -		Rp -	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 25,200,000
		13	Pembentukan dan Pengembangan Program Sayang Ibu dalam mendukung Ketahanan Keluarga	Terlaksananya Pembentukan Program Sayang Ibu dalam mendukung Ketahanan Keluarga		1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 12,600,000	1 Keg.	Rp 63,000,000
Meningkatnya Kualitas dan cakupan kesetaraan gender dan anak		**02**	**Program Penguatan Kelembagaan,Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**Persentase SKPD menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**	**10.00%**	**15.00%**	**Rp 291,979,000**	**15.00%**	**Rp 292,562,958**	**20.00%**	**Rp 293,148,084**	**20.00%**	**Rp 322,462,892**	**80.00%**	**Rp 338,586,037**	**80.00%**	**Rp 1,538,738,971**
		1	Optimalisasi Pokja Pengarusutamaan Gender Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Optimalisasi Pokja Pengarusutamaan Gender Kota Gunungsitoli		1 Keg.	Rp 35,000,000	1 Keg.	Rp 35,070,000	1 Keg.	Rp 35,140,140	1 Keg.	Rp 38,654,154	1 Keg.	Rp 40,586,862	1 Keg.	Rp 184,451,156
		2	Perayaan Hari Keluarga Nasional	Terlaksananya Perayaan Hari Keluarga Nasional		1 Keg.	Rp 35,000,000	1 Keg.	Rp 35,070,000	1 Keg.	Rp 35,140,140	1 Keg.	Rp 38,654,154	1 Keg.	Rp 40,586,862	1 Keg.	Rp 184,451,156
		3	Perayaan Hari Anak Nasional	Terlaksananya Perayaan Hari Anak Nasional		1 Keg.	Rp 35,000,000	1 Keg.	Rp 35,070,000	1 Keg.	Rp 35,140,140	1 Keg.	Rp 38,654,154	1 Keg.	Rp 40,586,862	1 Keg.	Rp 184,451,156

		4	Pelaksanaan Bulan Balita dan Generasi muda	Terlaksananya Bulan Balita dan Generasi Muda		1 Keg.	Rp	35,000,000	1 Keg.	Rp	35,070,000	1 Keg.	Rp	35,140,140	1 Keg.	Rp	38,654,154	1 Keg.	Rp	40,586,862	1 Keg.	Rp	184,451,156
		5	Pembentukan dan Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)		1 Keg.	Rp	36,979,000	1 Keg.	Rp	37,052,958	1 Keg.	Rp	37,127,064	1 Keg.	Rp	40,839,770	1 Keg.	Rp	42,881,759	1 Keg.	Rp	194,880,551
		6	Pembentukan rumah singgah anak korban kekerasan	Terbentuknya rumah singgah anak korban kekerasan		1 Keg.	Rp	40,000,000	1 Keg.	Rp	40,080,000	1 Keg.	Rp	40,160,160	1 Keg.	Rp	44,176,176	1 Keg.	Rp	46,384,985	1 Keg.	Rp	210,801,321
		7	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)		1 Keg.	Rp	35,000,000	1 Keg.	Rp	35,070,000	1 Keg.	Rp	35,140,140	1 Keg.	Rp	38,654,154	1 Keg.	Rp	40,586,862	1 Keg.	Rp	184,451,156
		8	PembentukanTempat Penitipan Anak bagi PNS	Pembentukan Tempat Penitipan Anak bagi PNS		1 Keg.	Rp	40,000,000	1 Keg.	Rp	40,080,000	1 Keg.	Rp	40,160,160	1 Keg.	Rp	44,176,176	1 Keg.	Rp	46,384,985	1 Keg.	Rp	210,801,321
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		**03**	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlidungan Perempuan**	**Cakupan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (%)**	**0.00%**	**15.00%**	**Rp**	**75,000,000**	**20.00%**	**Rp**	**75,150,000**	**20.00%**	**Rp**	**75,300,300**	**20.00%**	**Rp**	**82,830,330**	**75.00%**	**Rp**	**86,971,847**	**75.00%**	**Rp**	**395,252,477**
		1	Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan lain	Terlaksananya Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan lain		1 Keg.	Rp	12,500,000	1 Keg.	Rp	12,525,000	1 Keg.	Rp	12,550,050	1 Keg.	Rp	13,805,055	1 Keg.	Rp	14,495,308	1 Keg.	Rp	65,875,413
		2	Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Terlaksananya Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan terhadap perempuan dan anak		1 Keg.	Rp	12,500,000	1 Keg.	Rp	12,525,000	1 Keg.	Rp	12,550,050	1 Keg.	Rp	13,805,055	1 Keg.	Rp	14,495,308	1 Keg.	Rp	65,875,413
		3	Pelatihan Penanganan Psikososial	Terlaksananya Pelatihan Penanganan Psikososial		1 Keg.	Rp	12,500,000	1 Keg.	Rp	12,525,000	1 Keg.	Rp	12,550,050	1 Keg.	Rp	13,805,055	1 Keg.	Rp	14,495,308	1 Keg.	Rp	65,875,413
		4	Pelatihan Pendampingan dan Penanganan Hukum bagi Korban	Terlaksananya Pelatihan Pendampingan dan Penanganan Hukum bagi Korban		1 Keg.	Rp	12,500,000	1 Keg.	Rp	12,525,000	1 Keg.	Rp	12,550,050	1 Keg.	Rp	13,805,055	1 Keg.	Rp	14,495,308	1 Keg.	Rp	65,875,413
		5	Pelatihan tentang Penerimaan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Terlaksananya Pelatihan tentang Penerimaan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		1 Keg.	Rp	12,500,000	1 Keg.	Rp	12,525,000	1 Keg.	Rp	12,550,050	1 Keg.	Rp	13,805,055	1 Keg.	Rp	14,495,308	1 Keg.	Rp	65,875,413
		6	Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)		1 Keg.	Rp	12,500,000	1 Keg.	Rp	12,525,000	1 Keg.	Rp	12,550,050	1 Keg.	Rp	13,805,055	1 Keg.	Rp	14,495,308	1 Keg.	Rp	65,875,413
Meningkatnya peran serta gender dalam pembangunan		**04**	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**Cakupan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	**30.00%**	**10.00%**	**Rp**	**210,000,000**	**10.00%**	**Rp**	**210,420,000**	**15.00%**	**Rp**	**210,840,840**	**15.00%**	**Rp**	**231,924,924**	**80.00%**	**Rp**	**243,521,170**	**80.00%**	**Rp**	**1,106,706,934**

				1	Peringatan Hari Ibu	Terlaksananya Peringatan Hari Ibu		1 Keg.	Rp	10,000,000	1 Keg.	Rp	10,020,000	1 Keg.	Rp	10,040,040	1 Keg.	Rp	11,044,044	1 Keg.	Rp	11,596,246	1 Keg.	Rp	52,700,330		
				2	Peringatan Hari Kartini	Terlaksananya Peringatan Hari Kartini		1 Keg.	Rp	10,000,000	1 Keg.	Rp	10,020,000	1 Keg.	Rp	10,040,040	1 Keg.	Rp	11,044,044	1 Keg.	Rp	11,596,246	1 Keg.	Rp	52,700,330		
				3	Penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga Sejahtera	Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga Sejahtera		1 Keg.	Rp	10,000,000	1 Keg.	Rp	10,020,000	1 Keg.	Rp	10,040,040	1 Keg.	Rp	11,044,044	1 Keg.	Rp	11,596,246	1 Keg.	Rp	52,700,330		
				4	Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Terlaksananya Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha		1 Keg.	Rp	10,000,000	1 Keg.	Rp	10,020,000	1 Keg.	Rp	10,040,040	1 Keg.	Rp	11,044,044	1 Keg.	Rp	11,596,246	1 Keg.	Rp	52,700,330		
				5	Pameran Hasil Karya Perempuan di bidang Pembangunan	Terlaksananya Pameran Hasil Karya Perempuan di bidang Pembangunan		1 Keg.	Rp	10,000,000	1 Keg.	Rp	10,020,000	1 Keg.	Rp	10,040,040	1 Keg.	Rp	11,044,044	1 Keg.	Rp	11,596,246	1 Keg.	Rp	52,700,330		
				6	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga		1 Keg.	Rp	70,000,000	1 Keg.	Rp	70,140,000	1 Keg.	Rp	70,280,280	1 Keg.	Rp	77,308,308	1 Keg.	Rp	81,173,723	1 Keg.	Rp	368,902,311		
				7	Pembinaan Lembaga Berbasis Gender	Terlaksananya Pembinaan Dharma Wanita Kota Gunungsitoli		1 Keg.	Rp	70,000,000	1 Keg.	Rp	70,140,000	1 Keg.	Rp	70,280,280	1 Keg.	Rp	77,308,308	1 Keg.	Rp	81,173,723	1 Keg.	Rp	368,902,311		
				8	Pembinaan Desa Tertib Administrasi PKK	Terlaksananya Pembinaan Desa Tertib Administrasi PKK		1 Keg.	Rp	10,000,000	1 Keg.	Rp	10,020,000	1 Keg.	Rp	10,040,040	1 Keg.	Rp	11,044,044	1 Keg.	Rp	11,596,246	1 Keg.	Rp	52,700,330		
				9	Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2WKSS)	Terlaksananya Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2WKSS)		1 Keg.	Rp	10,000,000	1 Keg.	Rp	10,020,000	1 Keg.	Rp	10,040,040	1 Keg.	Rp	11,044,044	1 Keg.	Rp	11,596,246	1 Keg.	Rp	52,700,330		
Total									**Rp**	**2,839,386,023**		**Rp**	**2,845,064,795**		**Rp**	**2,850,754,925**		**Rp**	**3,135,830,416**		**Rp**	**3,255,971,897**		**Rp**	**14,927,008,057**		

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Program dan kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Anggaran Pada Tahun Ke-					Kondisi kinerja pada akhir periode
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli									
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Persen	0%	75%	76%	77%	78%	79%	79%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Kinerja pelayanan aparatur	Persen	0%	75%	76%	77%	78%	79%	79%
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kinerja pelayanan aparatur	Persen	0%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kinerja pelayanan aparatur	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	80%	80%
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA										
05	Program Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB (%)	Persen	60%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
06	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pencapaian Peserta KB Baru menurut Jenis Kontarasepsi (%)	Persen	60%	65%	70%	75%	77%	80%	85%
07	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rasio Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persen	5%	20%	35%	50%	65%	80%	80%
08	Program Pengembangan Pusat Informasi Konseling KRR	Rasio Upaya Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (%)	Persen	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
09	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Rasio Upaya Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh	Persen	0%	15%	30%	55%	75%	75%	75%
10	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rasio Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (%)	Persen	0%	15%	30%	35%	50%	80%	80%
11	Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU PADU	Rasio Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU PADU (%)	Persen	0%	15%	30%	45%	60%	75%	75%
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
01	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kebijakan daerah untuk peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persen	10%	15%	15%	20%	20%	80%	80%
02	Program Penguatan Kelembagaan,Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase SKPD menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Persen	10%	15%	15%	20%	20%	80%	80%

03	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlidungan Perempuan	Cakupan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (%)	Persen	0%	15%	20%	20%	20%	75%	75%
04	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persen	30%	10%	10%	15%	15%	80%	80%

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
8.1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	persen	28.00	31.00	36.00	38.00	41.00	45.00	45.00
8.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	38.42	38.42	38.42	38.42	38.42	38.42	38.42
8.3	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan	persen	60.00	65.10	70.20	75.30	80.00	80.00	80.00
8.4	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	56.40	59.80	63.20	66.60	70.00	70.00	70.00
15	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
15.1	Rata-rata Jumlah Anak per keluarga	persen	4.34	4.02	3.07	3.38	3.00	3.00	3.00
15.2	Rasio Akseptor KB	persen	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00	65.00	65.00
15.3	Cakupan Peserta KB Aktif	persen	64.00	68.00	72.00	76.00	80.00	80.00	80.00
15.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	persen	70.00	65.00	60.00	55.00	50.00	50.00	50.00